

Gugat Pernyataan Fadli Zon, para Pakar Hukum CALS Ajukan Amicus Curiae ke PTUN Jakarta

Reporter | Febrianto Adi Saputro
Editor | Fana Fadzikrillahi Suparman Putra

RABU, 25 FEBRUARI 2026, 17.36 WIB



Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

JAKARTA, investortrust.id -- Sejumlah guru besar dan dosen hukum tata negara serta hukum administrasi negara yang tergabung dalam Constitution and Administrative Law and Society (CALS) mengajukan *amicus curiae* atau sahabat pengadilan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (24/2/2026). Para pakar hukum itu mengajukan *amicus curiae* terkait perkara Nomor 335/G/TF/2025/PTUN.JKT mengenai gugatan perbuatan melawan hukum oleh Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon.

Gugatan tersebut dipicu oleh pernyataan publik Fadli Zon yang dinilai mengabaikan fakta sejarah terkait peristiwa Mei 1998. Dalam keterangannya, CALS menegaskan ucapan seorang pejabat negara di ruang publik bukanlah sekadar opini personal, melainkan bagian dari kebijakan publik.

"Pernyataan tersebut disampaikan dalam kapasitas jabatan dan berpotensi memengaruhi persepsi publik, sehingga harus memuat prinsip akuntabilitas, empati, dan kepentingan umum," kata dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang juga perwakilan CALS, Bivitri Susanti, Rabu (25/2/2026).

Baca Juga

Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Fadli Zon Sebut Tak Ada Masalah Hukum

Para pakar hukum ini menyoroti dampak sosial yang serius dari pernyataan tersebut, termasuk potensi reviktimisasi bagi para korban dan keluarga korban peristiwa masa lalu. CALS menilai narasi yang mengabaikan pengalaman korban dapat membuka kembali luka lama dan penderitaan mereka.

Para amici berpendapat justifikasi mengenai ada atau tidaknya peristiwa hukum seperti "perkosaan massal" pada Mei 1998 merupakan mandat lembaga investigatif atau yudisial, seperti Komnas HAM, Kejaksaan Agung, atau pengadilan HAM.

"Pernyataan tersebut dipandang relevan untuk diuji melalui mekanisme PTUN guna menilai kesesuaiannya dengan batas kewenangan jabatan serta prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya.

Baca Juga

Menlu Sugiono di Dewan HAM PBB: Prabowo Perkuat Upaya Wujudkan Keadilan Sosial

Dokumen *amicus curiae* ini didukung oleh 18 akademisi hukum tata negara ternama. Beberapa di antaranya, senior Partner Integrity Law Firm Denny Indrayana, guru besar hukum tata negara (HTN) UGM Zainal Arifin Mochtar, guru besar HTN Unpad Susi Dwi Harijanti, guru gesar HTN STH Indonesia Jentera Bivitri Susanti, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari.

Tag Terkait

fadlizon | fadli zon digugat | cals | peristiwa mei 1998

BERITA TERKAIT



Gugat Pernyataan Fadli Zon, para Pakar Hukum CALS Ajukan Amicus Curiae ke PTUN Jakarta

25/02/2026, 17.36 WIB





Prabowo Terima Menbud Fadli Zon, Bahas Rekomendasi Usulan Gelar Pahlawan Nasional 2026

05/11/2026, 07.22 WIB



Prabowo dan Fadli Zon Bahas Usulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

01/09/2026, 22.46 WIB



Fadli Zon Pastikan Desa Adat Sade Direvitalisasi Pascakebakaran, Bakal Ada Instalasi Pemadam

28/08/2026, 17.48 WIB



Otto Hasibuan Nilai Megawati Tak Tepat Ajukan Amicus Curiae

16/04/2024, 15.55 WIB



Kontrak Jasa Influencer Rp 14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad Disorot, KPK Minta Instansi Evaluasi



Perencana Keuangan Ungkap Dua Tipe Korban Pinjol, Paling Bahaya 'Kemakan' Gengsi!



Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Jadi Tersangka, Diduga Sadap Presiden Prabowo



Penipuan Catut Nama Perusahaan Legal Marak, Trader Diminta Waspada



Hadapi Tantangan Sandwich Generation, Andrew White Bagikan Pentingnya Legacy Planning



Riset NEXT: Indonesia Raja Sawit, tetapi Singapura yang Panen Untung



Muat Lebih Banyak ↓

investortrust investortrust English Edition

The Convergence Indonesia, lantai 5. Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Pusat, 12940.

FOLLOW US

KATEGORI

- MARKET
- MAKRO
- FINANCIAL
- BUSINESS
- NATIONAL
- ESG
- INTERNATIONAL
- FINANCIALTRUST
- INDEPTH
- LIFESTYLE

MEDIA

- PHOTO
- VIDEO

INFORMASI

- TENTANG KAMI
- PEDOMAN KAMI
- PUBLISHING
- KONTAK

PUBLIKASI

- BUKU

Telah diverifikasi oleh Dewan Pers

Sertifikat Nomor *1188/DP-Verifikasi/K/III/2024*